KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BURT Sewot Sama Pengamat
Tanggal : Jumat, 18 Agustus 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Tak Terima Disebut Enggak Tahu Diri

BURT Sewot Sama Pengamat

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tak terima dengan kritikan Direktur Center for Budget Analisis Uchok Sky Khadafi yang bilang Dewan enggak tahu diri dalam wacana pembangunan apartemen. Bagi BURT, kritikan tersebut serampangan dan tidak jelas justrungannya.

"INI kan baru wacana. Kemudian ada pengamat yang tidak tahu juntrungannya, kayak Uchok dan ada juga yang katanya pengamat rumah rakyat, menganggap seolah-olah DPR tidak tahu diri. Seolah-olah telah terjadi, telah disetujui Pemerintah, mau dibangun, bla-bla. Padahal, sebenarnya pembangunan ini baru wacana yang akan kita mintai persetujuannya," cetus Anggota BURT Irma Suryani Chaniago.

Sebelumnya, Uchok memang melontarkan kritikan keras atas wacana pembangunan apartemen DPR di lahan eks Taman Ria. Menurutnya, pembangunan itu tidak pas karena kondisi ekonomi masyarakat sedang susah. "Permintaan itu hanya menghambur-hamburkan uang. Masalahnya, kondisi ekonomi masyarakat sedang berat-beratnya. Mereka (DPR) tak tahu diri dengan usulan itu," kritiknya.

Dia pun menyarankan agar pengajuan anggaran untuk proyek tersebut dibatalnya. Kata dia, Dewan harusnya sadar bahwa masih banyak rakyat miskin yang tempat tinggalnya hanya beratapkan rumbia, lantai beralaskan tanah liat, dan ketika hujan bocor di mana-mana.

"DPR terlalu ingin dimanjakan dengan mengatakan Rumah Jabatan Anggota (RJA) di Kalibata terlalu jauh. Padahal, banyak rakyat yang berangkat kerja subuh pulang tengah malam sambil berdesak-desakan di angkutan umum. Bagi rakyat, jangankan bicara mesin pendingin (AC) seperti di apartemen-apartemen. Untuk bisa makan teratur saja mereka masih kesusahan," cetusnya lagi.

Menurut Irma, komentar Uchok tersebut terlalu terburu-buru. Sebab, pembangunan apartemen itu baru wacana. Wacana itu juga belum pernah dibahas dan belum tentu disepakati oleh DPR dan Pemerintah.

Wacana itu, lanjutnya, pertama kali dikemukakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Itu pun setelah dilakukan analisis dan kalkulasi terhadap efektivitas dan harga jual dua kompleks perumahan bagi DPR di Kalibata dan Ulujami.

"Jadi, tidak serta-merta dibuat istilah apartemen begitu. Sebab, sampai hari ini pun yang menunggu RJA itu hanya 40 persen, selebihnya diisi tenaga ahli dan saudara-saudara anggota Dewan. Jadi, dianggap RJA ini idle (nganggur), tidak bermanfaat. Banyak tidak dihuni," terang anggota Komisi IX DPR ini.

Dari kajian sementara, lanjutnya, jika dibuatkan apartemen di sekitar Senayan, kinerja anggota-anggota DPR malas bisa terpantau. "Jadi, tidak ada alasan telat ke kantor. Itu pun kalau RJA Kalibata dan Ulujami bisa masuk (terjual). Tapi itu masih wacana, belum ada permintaan anggaran," katanya.

RJA yang ada saat ini, menurutnya, tidak efektif lantaran akses menuju DPR sangat macet. Selain itu, banyak anggota Dewan yang sudah punya rumah pribadi di Jakarta. Kalaupun ada anggota yang menempati RJA, kebanyakan yang berasal dari daerah. Dari 560 anggota DPR, tidak lebih 40 persennya menempati perumahan tersebut.

"Rata-rata tinggal di rumah masing-masing, karena takut kalau ditinggal malah rusak. Tapi, rumah-rumah anggota DPR itu kan juga banyak yang jauh. Rumah saya contohnya di Utan Kayu. Cuma, kan Jakarta ini sudah sangat macet. Apalagi depan pintu keluar tol masuk ke DPR itu. Makanya, kadang-kadang banyak yang telat. Di depan DPR itu bisa 15-30 menit baru bisa masuk, saking macetnya," bebernya.

Makanya, lanjut Irma, pimpinan DPR mengusulkan agar RJA Kalibata dan Ulujami diganti apartemen yang lokasinya di sekitar Senayan. Ada pun lokasi yang tengah disiapkan DPR untuk apartemen adalah lahan eks Taman Ria Senayan, samping kantor pusat TVRI dan Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Tapi, saya sudah sampaikan ke pimpinan BURT, mesti ada visibility study. Berapa anggaran untuk apartemen, dan berapa harga jual RJA Ulujami dan Kalibata. Ini supaya tidak bebani biaya Pemerintah. Saya juga sudah sampaikan manfaat dan kemudahan. RJA Kalibata luas sekali sementara biaya perawatan besar. Belum gaji sekuriti yang berjumlah 30 orang, belum listrik untuk tamannya. Bayangkan, untuk biaya perbaikan dan furnitur saja bisa Rp 120 miliar per tahun, sementara yang tinggali cuma 40 persen. Jadi tidak idle sekali. Rugilah, anggaran juga mubazir. Sayang kan," katanya. ■ KAL